



Kemenkes

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

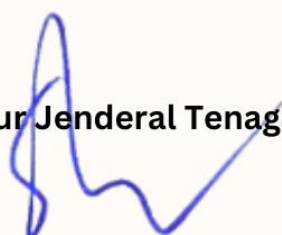
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024, yang disusun untuk menjaga keselarasan kegiatan per tahun agar tetap sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan adanya dokumen ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan evaluasi program / kegiatan tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan di bidang kesehatan masyarakat khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia Kesehatan setahun yang disusun untuk menjadi pedoman dan arah bagi seluruh pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan masyarakat khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia Kesehatan yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan bidang pengembangan sumber daya manusia Kesehatan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



drg. Arianti Anaya, MKM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.2.1. Maksud penyusunan rencana kinerja tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024	5
1.2.2. Tujuan penyusunan rencana kinerja tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024	6
1.3. Struktur Organisasi	6
BAB II ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	
2.1. Tugas dan fungsi	8
2.2. Indikator Sasaran Strategis	9
2.3. Indikator Kinerja Program	9
2.4. Sumber dana	10
2.5. Program	10
2.5.1. Rincian kinerja program dan kegiatan	11
BAB III POKOK-POKOK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	
3.1. Pagu Tahun Anggaran 2023 Per 12 Januari 2024	18
3.2. Realisasi Tahun Anggaran 2023 Per 12 Januari 2024 Pukul 16.15 WIB	21
3.3. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM yang berkualitas	25
3.4. ISS 2: Meningkatnya faskes dengan SDM kesehatan	
yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	29
3.5. ISS 3: Meningkatnya faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	40
3.6. Nilai kinerja anggaran (NKA) dan realisasi anggaran direktorat jenderal tenaga kesehatan	40
3.6.1. NKA Ditjen Tenaga Kesehatan	40
3.6.2. Satker NKA Tertinggi dan Terendah	41
3.6.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Tenaga Kesehatan	42
3.6.4. 10 Satker Penyerapan Tertinggi dan Terendah	42
3.6.5. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	43

3.7. CASCADING ISS-IKP-IKK Transformasi SDM Kesehatan	46
3.7.1. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	46

BAB IV RENCANA KERJA TAHUNAN

4.1. Pokok- Pokok Kebijakan Rencana Kerja Tahunan 2024	51
4.2. Alokasi Anggaran berdasarkan kewenangan dan distribusi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2024	52
4.3. Distribusi Pagu Anggaran pada tahun 2024 per sumber dana	53
4.4. Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024	58
4.4.1. Pagu Indikatif	58
4.4.2. Pagu Anggaran	59
4.4.3. Pagu Alokasi	59

BAB V PENUTUP

5.1. Penutup	61
--------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan Kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I dan seterusnya sampai ke Satker yang disebut dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja sesuai dengan permenpan nomor 53 tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan Tahun 2024 merupakan rencana kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan atau masa tahun berjalan di tahun 2024 ditetapkan dengan maksud memberi arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan.

1.2.2. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 adalah Sebagai Berikut :

- a. Memberikan arah bagi jajaran manajemen dalam mengelola, melaksanakan, mengembangkan program-program teknis dan pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan dan pelaksanaan tata kelola administrasi.
- b. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- c. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan dapat konsisten dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan.
- d. Sebagai acuan dalam perencanaan kerja tahunan berikutnya.
- e. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja di akhir tahun anggaran 2024.

1. 3. Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan di Pimpin oleh Direktur Jenderal.



Selain mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan juga mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Terkait Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sedangkan untuk Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, tentang Kementerian Kesehatan, Bagian Ketujuh (7) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan dan kesejahteraan tenaga Kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan dan kesejahteraan tenaga Kesehatan
3. Penyusunan Norma, standar, prosedur dan kriteria di di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan dan kesejahteraan tenaga Kesehatan
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan dan kesejahteraan tenaga Kesehatan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri

2.2. Indikator Sasaran Strategis

Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2023	Capaian TW IV 2023	Target 2024	Keterangan
Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83%	67.93	100%	Tercapai (melebihi target)
	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50 %	57.63	60 %	Tercapai (melebihi target)
	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60 %	84.13	100 %	Tercapai (melebihi target)

2.3. Indikator Kinerja Program

Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2023		2024
		Target	Capaian TW IV 2023	Target
1	Persentase Puskesmas dengan dokter	100	96.84	100
2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71	56.22	83
3	Persentase RSUD Kabupaten /kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85	79.64	90
4	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	60	64.16	100
5	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	28.000	76.221	37,600
6	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	108.492	30.000

2.4. Sumber dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan nomor DIPA: -024.12.0/2024 tanggal 24 November 2024

No	Nomenklatur	Jumlah Anggaran
1	Rupiah Murni	Rp. 4.127.326.263.000
2	PNBP	Rp. 245.760.687.000
3	BLU	Rp. 968.202.055.000
	TOTAL	Rp. 5.341.289.005.000

2.5. Program

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan nomor DIPA: -024.12.0/2024 tanggal 24 November 2024

Kode	Nomenklatur	Jumlah Anggaran
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	252.225.756
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.160.285.269
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.928.777.980
	TOTAL	5.341.289.005
Terbilang : Lima Triliyun Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Rupiah,-		

2.5.1. Rincian Kinerja Program dan Kegiatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dengan nomor DIPA: -024.12.0/2024 tanggal 24 November 2024

Kode	Program	Kode	Sasaran Program	Kode	Indikator Kinerja Program	Volume / Satuan	Alokasi / Dana
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						252.225.756
		SP01	Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional				
		KP04	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar				
		IKP01	Persentase Puskesmas dengan dokter			100%	
		IKP02	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar			83 %	
		IKP03	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya			90%	
		IKP04	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi			100%	
		6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan				24.241.808
				01.01	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan	100 %	

					tenaga kesehatan yang berkualitas		
		6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan				110.627.816
				01.01	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	
				01.02	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	60%	
				01.03	Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	90%	
				01.04	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang	
				01.05	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100 %	
		6813	Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan				53.624.775
				01.01	Persentase STR Tenaga Kesehatan	100 %	

					yang di terbitkan tepat waktu janji layanan		
		6814	Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi				23.256.924
				01.01	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang di terbitkan sesuai janji layanan	100%	
		6815	Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan				40.474.433
				01.01	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	100%	
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
		SP01	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar				
		IKP01	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan				
		IKP02	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas				

		5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				1.618.004.198
				01.01	Persentase Lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di puskesmas	50%	
		5234	Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan				684.735.158
				01.01	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas kementerian kesehatan	98%	
		6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan				236.500.930
				01.01	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	32000 orang	
				01.02	Jumlah Tenaga Kesehatan di dinas kesehatan kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	1600 orang	
				01.03	Jumlah Tenaga Laboratorium di Labkesmas yang	4000 orang	

					terlatih surveilans epidemiologi		
				01.04	Jumlah SDM yang di tingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	30000 orang	
				01.05	Persentase Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang terakreditasi	90 Orang	
		6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan				621.044.983
				01.01	Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	900 Orang	
				01.02	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	100 Persentase	
				01.03	Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	1500 Orang	
				01.04	persentase daerah prioritas yang memperoleh program	90 Persentase	

					beasiswa pendidikan SDM kesehatan		
				01.05	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	1660 orang	
				01.06	Persentase daerah spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	100 persentase	
				01.07	Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan program AHS	70 Perguruan tinggi	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen						1.928.777.980
		4399	Tata Kelola SDM				78.949.628
				02.01	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya	1590 orang	
		6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan				1.849.828.352

				01.01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	36 Indeks	
				01.02	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95 Indeks	

BAB III
POKOK-POKOK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

3.1. Pagu Tahun Anggaran 2023 Per 12 Januari 2024

SATKER	Pagu TA 2023 Per 12 Januari 2024					
	Rupiah Murni	PNBP	BLU	HDN	HLN	Jumlah
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	4.879.451.993	197.762.600	1.042.355.958	981.700	3.127.441	6.123.679.692
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	35.839.713	2.275.158	-	-	-	38.114.871
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	35.684.569	2.922.209	-	-	-	38.606.778
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	44.986.645	-	72.706.821	-	-	117.693.466
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	45.988.727	-	29.545.300	-	-	75.534.027
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CIOTO	57.677.201	2.050.343	-	-	-	59.727.544
POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	89.936.278	7.335.011	-	-	-	97.271.289
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	204.461.441	-	164.071.627	-	-	368.533.068
POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	81.300.003	-	59.796.401	-	-	141.096.404
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	96.629.247	-	58.231.610	-	-	154.860.857
POLITEKNIK KESEHATAN PALU	67.545.971	7.329.859	3.247.759	-	-	78.123.589
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	78.845.991	-	45.034.644	-	-	123.880.635
POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	77.482.407	8.115.520	-	-	-	85.597.927
POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	65.744.098	4.573.954	-	-	-	70.318.052

POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	64.333.638	-	29.188.285	-	-	93.521.923
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	55.260.670	-	35.898.162	-	-	91.158.832
POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	50.720.357	-	29.229.000	-	-	79.949.357
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	51.683.080	-	38.778.800	-	-	90.461.880
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	69.589.086	-	34.230.652	-	-	103.819.738
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	51.419.574	5.136.700	-	-	-	56.556.274
POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	82.312.699	7.880.079	14.791.179	-	-	104.983.957
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG	54.619.646	1.806.345	-	-	-	56.425.991
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	38.413.864	10.752.000	-	-	-	49.165.864
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	77.592.267	8.825.586	-	-	-	86.417.853
POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	51.839.070	547.285	6.423.049	-	-	58.809.404
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	75.535.380	-	23.536.110	-	-	99.071.490
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	69.650.972	8.342.347	8.120.261	-	-	86.113.580
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	58.906.093	875.036	-	-	-	59.781.129
POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	67.805.931	2.641.025	-	-	-	70.446.956
POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	42.509.289	6.818.987	-	-	-	49.328.276
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM	49.986.432	-	-	-	-	49.986.432
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	82.192.271	6.145.391	10.552.535	-	-	98.890.197
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	113.250.042	-	86.342.225	-	-	199.592.267

POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	59.905.705	-	71.765.767	-	-	131.671.472
POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	93.297.368	17.500.962	-	853.700	-	111.652.030
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.735.812.492	33.563.244	-	-	3.127.441	1.772.503.177
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	51.814.752	4.888.632	-	-	-	56.703.384
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	78.372.001	-	42.800.440	-	-	121.172.441
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	113.521.290	7.180.217	13.389.003	-	-	134.090.510
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	48.154.124	-	39.107.336	-	-	87.261.460
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	79.990.577	3.169.895	8.824.227	-	-	91.984.699
POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	43.959.799	9.978.458	-	128.000	-	54.066.257
POLTEKES KEMENKES ACEH	139.932.285	7.766.581	12.668.550	-	-	160.367.416
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	72.550.041	-	66.680.911	-	-	139.230.952
POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	47.884.719	10.113.951	7.063.489	-	-	65.062.159
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	69.647.591	-	28.828.420	-	-	98.476.011
POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	54.866.597	9.227.825	1.503.395	-	-	65.597.817

3.2 Realisasi Tahun Anggaran 2023 Per 12 Januari 2024 Pukul 16.15 WIB

SATKER	Realisasi TA 2023 Per 12 Januari 2024 16.15 WIB						
	Rupiah Murni	PNBP	BLU	HDN	HLN	Jumlah	Persen Realisasi
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	4.765.624.253	189.846.414	990.176.924	981.700	-	5.946.629.291	97,11%
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	35.716.767	2.270.910	-	-	-	37.987.677	99,67%
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	35.552.817	2.917.052	-	-	-	38.469.869	99,65%
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	44.823.104	-	72.343.563	-	-	117.166.667	99,55%
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	45.868.039	-	29.271.883	-	-	75.139.922	99,48%
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	57.275.807	2.050.226	-	-	-	59.326.033	99,33%
POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	89.373.199	7.164.845	-	-	-	96.538.044	99,25%
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	204.177.960	-	161.364.834	-	-	365.542.794	99,19%
POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	80.612.776	-	59.287.487	-	-	139.900.263	99,15%
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	96.395.169	-	57.126.254	-	-	153.521.423	99,14%
POLITEKNIK KESEHATAN PALU	67.218.958	7.324.272	2.880.733	-	-	77.423.964	99,10%
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	78.481.784	-	44.083.256	-	-	122.565.040	98,94%
POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	76.775.560	7.898.188	-	-	-	84.673.748	98,92%
POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	65.139.528	4.407.717	-	-	-	69.547.244	98,90%
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	63.341.699	-	29.130.192	-	-	92.471.892	98,88%

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	54.883.557	-	35.231.921	-	-	90.115.477	98,86%
POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	49.825.724	-	29.139.029	-	-	78.964.753	98,77%
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	51.300.018	-	37.994.348	-	-	89.294.367	98,71%
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	69.418.272	-	32.862.766	-	-	102.281.039	98,52%
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	50.687.038	4.942.418	-	-	-	55.629.456	98,36%
POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	81.841.408	7.861.222	13.451.980	-	-	103.154.609	98,26%
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG	53.670.954	1.764.306	-	-	-	55.435.260	98,24%
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	37.963.508	10.238.600	-	-	-	48.202.108	98,04%
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	76.772.492	7.887.065	-	-	-	84.659.558	97,97%
POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	50.882.080	547.283	6.137.535	-	-	57.566.897	97,89%
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	74.439.348	-	22.458.869	-	-	96.898.217	97,81%
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	68.929.009	8.225.023	6.971.398	-	-	84.125.429	97,69%
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	57.417.508	872.859	-	-	-	58.290.368	97,51%
POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	66.720.403	1.836.110	-	-	-	68.556.513	97,32%
POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	41.173.510	6.624.800	-	-	-	47.798.310	96,90%
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM	48.422.345	-	-	-	-	48.422.345	96,87%
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	81.309.843	6.115.627	8.329.934	-	-	95.755.404	96,83%
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	111.112.978	-	82.113.341	-	-	193.226.320	96,81%
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	59.401.379	-	68.025.836	-	-	127.427.215	96,78%

POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	89.945.839	17.133.918	-	853.700	-	107.933.457	96,67%
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.681.064.843	32.207.672	-	-	-	1.713.272.515	96,66%
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	50.197.376	4.604.592	-	-	-	54.801.969	96,65%
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	77.444.935	-	39.573.267	-	-	117.018.202	96,57%
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	109.189.660	6.931.571	12.554.863	-	-	128.676.094	95,96%
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	47.111.861	-	35.951.568	-	-	83.063.430	95,19%
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	77.526.944	3.168.449	6.340.163	-	-	87.035.555	94,62%
POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	41.900.393	8.988.772	-	128.000	-	51.017.165	94,36%
POLTEKES KEMENKES ACEH	133.851.868	7.766.516	9.406.558	-	-	151.024.943	94,17%
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	71.027.114	-	58.259.859	-	-	129.286.973	92,86%
POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	45.437.046	9.102.360	5.585.513	-	-	60.124.918	92,41%
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	66.327.728	-	22.803.445	-	-	89.131.172	90,51%
POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	47.674.104	8.994.043	1.496.528	-	-	58.164.675	88,67%

Pilar 5 Transformasi SDM Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
PILAR 5: TRANSFORMASI SDM KESEHATAN

Indikator Sasaran
Strategis

3

Indikator Kinerja
Program

6

Indikator Kinerja
Kegiatan

23



3.3. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDMK yang berkualitas

Rencana Aksi 2023 – Indikator Sasaran Strategis I

ISS : Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDMK yang berkualitas (1/3)

IKP	IKK	PIC	Target 2023				Capaian TW IV	Alokasi Anggaran	Potential Blocker	Tindak Lanjut	Status
			B03	B06	B09	B12					
1. Persentase puskesmas dengan dokter	a) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	Dit. Gun Nakes	96%	97%	98%	100%	96,84%	14,6 M	kurang lebih 4% puskesmas yang belum terpenuhi tenaga dokternya sebagian besar berada di wilayah puskesmas yang berada dalam Lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras	- SKB 3 Menteri (Kemendagri, Kemenag, Kemenkes) dan TNI, POLRI tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, daerah rawan konflik. Saat ini draft SKB dalam proses permohonan persetujuan dari Menkes. - Proses kerja sama dengan misionaris melalui Kemenag dan keuskupan dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus pada lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras).	
	b) Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	Dit. Gun Nakes	40%	40%	45%	50%	72.25%	5.1 M			

2. Persen tase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	a) Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	Dit. Gun Nakes	50%	60%	70%	80%	56.22%	90,3 M	1. Kekosongan formasi tenaga kesehatan untuk lokus puskesmas tertentu (daerah rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit, tidak ada sarpras) dan tidak diminati 2. Kurangnya supply jenis tenaga tertentu (dokter gigi) 3. Mekanisme pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan terbatas melalui kontrak daerah karena pemberlakuan batas akhir untuk tenaga kontrak sd 28 November 2023 (Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor B/185/M.SM.0 2.03/2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)	1. Memastikan formasi melalui PPPK dengan melakukan earmark Dana Alokasi Umum 2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk wilayah tertentu melalui penugasan khusus	
---	---	----------------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--	---	---

2. dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	b) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan yang berkualitas	Dit. Ren Nakes	0	0	0	100	100	17.8 M		Proses penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan: 1. Pembukaan aplikasi renbut agar fasyankes menghitung kebutuhan nakes periode 2023 sesuai beban kerja dan verval oleh Dinkes (Nov 2022 sd Januari 2023)--> Selesai 2. Verifikasi dan validasi renbut nakes tingkat nasional (Feb sd 30 Maret 2023)--> Selesai 3. Renbut nakes sebagai rekomendasi usulan formasi PPPK JFK (20 Maret sd 30 April 2023)--> Selesai 4. Pembukaan aplikasi renbut untuk rencana kebutuhan nakes periode 2024 dan verval oleh Dinkes (20 Juli sd 31 Agst 2023) 5. Verifikasi dan validasi renbut nakes tingkat nasional Periode 2024 (September 2023) 6. Renbut Nakes Periode 2024 tersusun dan aplikasi renbut ditutup (30 September 2023)	
2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	c) Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	Set. KKI	100	100	100	100	93.97%	26,6 M	Adanya kendala teknis pada sistem aplikasi	Perbaikan aplikasi oleh pengembang serta melakukan pemantauan proses STR secara berjenjang dan intens baik di lingkup sekretariat KKI maupun Konsilor KKI.	
2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	d) Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu	Set KTKI	100	100	100	100	100%	32 M			

	sesuai janji layanan										
3. Persentase RSUD kab/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	a) Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	Dit. Gun Nake s	100	100	100	100	100	32,2 M	1. Sistem pendidikan asal calon peserta berbeda-beda sehingga mekanisme penyetaraan harus disesuaikan dan terdapat beberapa pemohon tidak bisa disetarakan dengan pendidikan spesialis di Indonesia 2. Mekanisme evaluasi kompetensi pra adaptasi masih bergabung dengan ujian nasional (board) Program Pendidikan Dokter Spesialis	1. menyusun daftar institusi pendidikan di luar negeri yang direkognisi pemerintah dan disosialisasikan 2. memperbaiki instrumen evaluasi kompetensi pra adaptasi berbasis license exam dengan melibatkan Tim ahli 3. Menyelenggarakan evaluasi kompetensi pra adaptasi secara mandiri/terpisah dari ujian nasional (board) Program Pendidikan Dokter Spesialis dalam bentuk <i>license exam</i>	
	b) Jumlah lulusan Pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	Dit. Gun Nake s	169	266	400	600	565	11,6 M	1. Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis terbatas dan pemerintah belum bisa mengatur pola penempatan, 2. PGDS bersifat sukarela dan	1. Penyelesaian rancangan Perpres Bakti Kerja Dokter Spesialis (BKDS), dengan substansi antara lain mengatur pola penempatan dokter spesialis. Saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan Set.Neg (Sept 2023)	

									Dokter spesialis bebas memilih RS lokasi penempatan		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4. ISS 2: Meningkatnya faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya

IKP	IKK	PIC	Target 2023				Capaian TW IV	Aloka si Angg aran	Potential Blocker	Tindak Lanjut	Sta tus
			B03	B06	B09	B12					
1. Jumlah SDMK yang ditingkatk an kompete nsinya untuk menduku ng sistem ketahana n kesehata n	a) Jumlah tenaga kesehata n di Puskesm as yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	Dit. Mutu Nakes	6000	6000	6000	6000	62.058 (angka baseline di 2022 adalah 17.555)	6 M			
2. Jumlah SDMK yang ditingkat kan kompete nsinya sesuai dengan 9	b) Jumlah tenaga kesehata n di dinkes Kabupat en kota yang terlatih surveilans	Dit. Mutu Nakes	250	250	250	250	9.169 (angka baseline di 2022 adalah 906)	8,3 M			

penyakit prioritas	epidemiologi *(kumulatif)										
	c) Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(kumulatif)	Dit. Mutu Nakes	750	750	750	750	4.994	200 juta			
	d) Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 jenis penyakit prioritas	Dit. Mutu Nakes	6250	6250	6250	6250	108.492	31,8 miliar			
2. Jumlah SDM yang ditingkatkan	e) Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang	Dit. Mutu Nakes	12,5%	25%	37,5%	50%	79,41 %	2,8 miliar		Tetap dilakukan penilaian terhadap institusi	

kompetensi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Kesehatan yang terakreditasi *(kumulatif)									penyelenggara pelatihan bidang kesehatan (baik institusi baru atau institusi yang re- akreditasi)	
	f) Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	Dit. Pen Nakes	0	0	800	800	800	86,6 miliar		Melaksanakan seleksi peserta baru dengan jadwal : 1. Pendaftaran 26 Juni - 15 Juli 2023 2. Seleksi Adm Tk. Dinkes Prov 3-17 Juli 2023 3. Seleksi Adm Tk. Pusat 18- 31 Juli 2023 4. Pengumuman kelengkapan berkas 2 Agt 2023	

										5. Masa sanggah calon peserta 3- 4 Agt 2023 6. Pengum uman hasil seleksi adm 11 Agt 2023 7. Konfirma si kelulusa n akademi k 12-19 Agt 2023 8. Penetap an SK peserta beasisw a 25 Agt 2023	
	g) Persenta se daerah prioritas yang memper oleh program beasisw a pendidik an dokter	Dit. Pen Nakes	0	0	80	80	92,13%				

2. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	h) Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	Dit. Pen Nakes	1.314	1.314	1.500	1.500	1.314 (87,64%)	17,4 miliar	1. Pemerintah daerah belum dapat mendayagunakan baik melalui CPNS, P3K atau mekanisme lain karena adanya keterbatasan fiskal 2. Perubahan kebijakan tentang pengadaan pegawai pemerintah yang hanya melalui ASN dan P3K. 3. Salah satu syarat pendaftaran P3K, minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun sehingga	1. Melanjutkan pemberian bantuan pendidikan bagi peserta lanjutan Padinkes yang telah direkrut tahun 2021 dan 2022	

									lulusan Padinakes tidak bisa mendaftar		
									4. Atas kendala tersebut, tahun 2023 tidak dilakukan rekrutmen peserta baru		
2. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	i) Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa Pendidikan SDM kesehatan	Dit. Pen Nakes	0	0	80	80	88% (197 kab/kota dari 305 kab/kota daerah prioritas			Proses rekrutmen peserta baru : 1. Pengumuman seleksi adm tk. Pusat mgg ke-4 Apr 2. Seleksi akademik mgg ke-4 Apr s.d mgg ke-3 Agst 3. Pengumuman hasil seleksi akademik mgg ke-4 Agst	

										4. Verifikasi berkas adm dan akademik mgg ke-4 Agst - mgg ke-4 Sept 5. Penerbitan SK penerima tubel mgg ke-3 Okt	
	j) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	Dit. Pen Nakes	1.209	1.209	1.760	1.760	1.882	77,1 miliar		Proses rekrutmen peserta baru : 1. Pengumuman seleksi adm tk. Pusat mgg ke-4 Apr 2. Seleksi akademik mgg ke-4 Apr s.d mgg ke-3 Agst 3. Pengumuman hasil seleksi akademi	

										k mgg ke-4 Agst 4. Verifikasi berkas adm dan akademi k mgg ke-4 Agst - mgg ke- 4 Sept 5. Penerbitan SK penerima tubel mgg ke-3 Okt	
	k) Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	Dit. Pen Nakes	5	20	80	100	61,68	193,9 miliar		1. Desk data pengembalian dengan pengelola PPDS Provinsi/ TNI/Polri /Biro OSDM Minggu ke-3 Juli 2023 2. Up dating data bekerja sama dengan FK/FKG	

										untuk konfirmasi data kelulusan peserta yang telah berakhir masa pendidikannya pada semester genap TA 2022/2023 pada akhir Juli 2023	
2. Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan penyakit prioritas 9	l) Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan program AHS	Dit. Pen Nakes	30	35	45	50	77 Perguruan Tinggi	3,1 miliar		Memonitor dan mengevaluasi capaian 4 levers AHS : 1. Peningkatan kuota mahasiswa dokter dan dokter spesialis 2. Peningkatan jumlah dosen 3. Peningkatan jml RS pendidikan 4. Peningkatan jml FK	

										dan prodi spesialis	
	m) Persentase lulusan Kemenkes yang diterima sebagai nakes di Puskesmas	Dit. Pen Nakes	0	15	30	45	54,65	1,2 miliar	Belum terstandarisasi sistem informasi untuk pelaksanaan Tracer Study	1. dilakukan Standarisasi <i>google form</i> tracer study sesuai Pedoman Study 2. Pengembangan Tracer 3. Sistem Informasi Poltekkes Kemenkes (SIPK) oleh Pusdatin bekerjasama dengan DTO Kemenkes. SIPK mencakup tracer study dan terintegrasi antara PD-DIKTI, Poltekkes dan SI-SDMK	

2. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	n) Persenta se dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kemenkes di Fasyankes	Dit. Gun Nakes	27	42	69	98	99,02	660 miliar	1. Anggaran PIDGI belum teralokasi sesuai dengan prediksi lulusan dari AFDOKGI sebanyak 3.000 orang. Alokasi anggaran sebanyak 800 orang peserta. 2. Masih terdapat peserta PIDI & PIDGI yg mengundurkan diri dikarenakan wahana penugasan tidak sesuai dengan keinginan peserta untuk melaksanakan internsip.	Usulan tambahan anggaran PIDGI. Memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri yang telah mendapatkan wahana penugasan. (berupa 6 bulan tidak dapat mendaftar internsip)	

3.5. ISS 3: Meningkatnya faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi

IKP	IKK	PIC	Target 2023				Capaian TW IV	Alokasi Anggaran	Potential Bloker	Tindak Lanjut	Status
			B03	B06	B09	B12					
1. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	a) Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	Dit. Binwas Nakes	37%	45%	50%	60 %	69,96	17,39 miliar			

3.6. NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

3.6.1. NKA Ditjen Tenaga Kesehatan

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Data SMART DJA per 10 Januari 2023

3.6.2. Satker NKA Tertinggi dan Terendah

Daftar 10 (sepuluh) Satuan Kerja dengan NKA Tertinggi

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Pengukuran	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
26	621240	POLTEKNIK KESEHATAN JOMBANG	92,85	99,15	86,68	100,00	13,50	83,76
20	621200	POLTEKNIK KESEHATAN JAKARTA 2	92,26	88,53	87,57	100,00	13,90	84,75
40	621600	POLTEKNIK KESEHATAN MALUKU	91,83	96,36	92,82	97,25	12,81	82,02
5	621240	SEKOLAH PELATIHAN KESEHATAN CIBINANG	90,84	97,41	98,10	100,00	8,03	70,07
23	621220	POLTEKNIK KESEHATAN TADUNGALAYA	90,29	90,50	77,90	100,00	13,34	83,35
29	621295	POLTEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	90,23	93,01	99,42	100,00	7,43	68,58
4	621230	SEKOLAH BISNIS PELATIHAN KESEHATAN SIPPLI JAKARTA	89,57	98,34	99,61	100,00	5,73	64,33
36	621607	POLTEKNIK KESEHATAN MALANG	89,57	95,63	99,47	100,00	6,14	65,34
27	621270	POLTEKNIK KESEHATAN MATARAM	89,40	93,42	97,99	100,00	6,58	66,46
2	621150	SEKOLAH PELATIHAN KESEHATAN SATAN	89,35	99,63	98,59	100,00	5,51	63,78

Data SMART DJA per 8 Januari 2023



24

Daftar 10 (sepuluh) Satuan Kerja dengan NKA Terendah

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Pengukuran	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
38	621550	POLTEKNIK KESEHATAN SURABAYA	48,44	96,77	77,16	57,49	-20,30	0,00
12	621120	POLTEKNIK KESEHATAN PADANG	56,46	91,57	98,69	58,15	-9,08	27,29
30	621200	POLTEKNIK KESEHATAN KULONKOTA TIMUR	60,95	91,77	88,35	68,35	-11,28	21,80
43	621610	POLTEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	66,23	98,92	99,16	88,71	-20,30	0,00
9	620480	POLTEKNIK KESEHATAN JAMPURA PROSPER PAPUA	73,36	95,70	82,39	85,65	-3,46	41,34
32	621217	POLTEKNIK KESEHATAN MANADO	74,67	94,93	98,98	72,49	2,26	55,65
10	620470	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	79,38	95,67	82,97	92,88	0,42	51,05
16	621190	POLTEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	81,62	95,93	72,66	97,26	3,48	58,69
15	621180	POLTEKNIK KESEHATAN SEMBULUNG	82,03	97,41	96,08	96,29	-1,52	46,19
39	621200	POLTEKNIK KESEHATAN ACEH	83,99	94,17	70,80	100,00	5,83	64,57

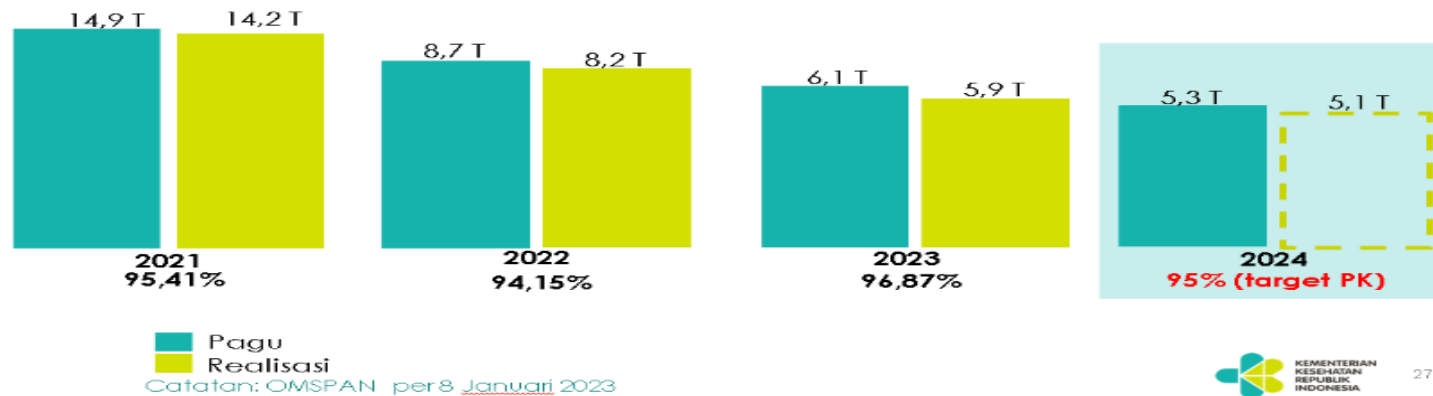
Data SMART DJA per 8 Januari 2023



25

3.6.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Tenaga Kesehatan

Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Tenaga Kesehatan 2021-2023



3.6.4. 10 Satker Penyerapan Tertinggi dan Terendah

Daftar 10 (sepuluh) Satuan Kerja dengan Penyerapan Tertinggi

Click to add text

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
2	325151	BALAI PELATIHAN KESEHATAN SATAM	89,35	99,63	98,59	100,00	5,51	63,78
25	632359	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	86,11	99,54	99,85	100,00	0,67	51,67
1	237240	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	89,23	99,50	99,96	100,00	5,01	62,53
6	416358	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	89,22	99,31	97,42	100,00	5,68	64,20
18	632181	POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	86,12	99,31	99,90	100,00	0,70	51,75
24	632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	84,56	99,18	90,61	100,00	0,91	52,27
26	632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOYAKARTA	92,85	99,15	86,68	100,00	13,50	83,76
11	632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	86,48	99,02	99,91	100,00	1,24	53,11
34	632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	86,50	98,93	99,88	100,00	1,29	53,23
43	637616	POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	66,23	98,92	99,16	88,71	-20,00	0,00

Data SMART DJA per 8 Januari 2023

Daftar 10 (sepuluh) Satuan Kerja dengan Penyerapan Terendah

Click to add text

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
40	637600	POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	91,03	86,36	92,82	97,25	12,81	82,02
20	632300	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	92,26	88,53	87,57	100,00	13,90	84,75
23	632338	POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	90,29	90,50	77,90	100,00	13,34	83,35
12	632138	POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	56,46	91,57	98,69	50,15	-9,08	27,29
30	632306	POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	60,95	91,77	88,35	68,35	-11,28	21,80
22	632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	84,95	92,48	95,20	95,00	4,23	60,58
29	632261	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	90,23	93,01	99,42	100,00	7,43	68,58
27	632270	POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	89,40	93,42	97,99	100,00	6,58	66,46
31	632310	POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	89,21	93,62	97,66	100,00	6,38	65,94
39	637592	POLTEKES KEMENKES ACEH	83,99	94,17	70,80	100,00	5,83	64,57

Data SMART DJA per 8 Januari 2023



30

3.6.5. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

3.6.5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program TA 2023

Pagu dan Realisasi Anggaran Per Program TA 2023

	Program	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Pelayanan Kesehatan dan JKN	183.222.265.000	168.756.665.230	14.465.599.770	92,10
2	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.787.495.639.000	3.623.972.156.733	163.523.482.267	95,68
3	Dukungan Manajemen	2.152.961.788.000	2.101.068.842.552	51.892.945.448	97,59
	Jumlah	6.123.679.692.000	5.893.797.664.515	229.882.027.485	96,25

3.6.5.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Belanja TA 2023

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Sisa</u>	<u>%</u>
1 <u>Pegawai</u>	1.019.772.453.000	1.005.543.546.121	14.228.906.879	98,60
2 <u>Barang</u>	3.744.710.038.000	3.566.274.502.581	178.435.535.419	95,23
3 <u>Modal</u>	1.359.197.201.000	1.321.979.615.813	37.217.585.187	97,26
<u>Jumlah</u>	6.123.679.692.000	5.893.797.664.515	229.882.027.485	96,25

3.6.5.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan TA 2023

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Sisa</u>	<u>%</u>
1 Kantor Pusat	1.772.503.177.000	1.695.732.820.715	76.770.356.285	95,67
2 Kantor Daerah	4.351.176.515.000	4.198.065.476.675	153.111.038.325	96,48
<u>Jumlah</u>	6.123.679.692.000	5.893.797.664.515	229.881.394.610	96,25

3.6.5.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Sumber Dana TA 2023

<u>Progam</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Sisa</u>	<u>%</u>
1 Rupiah Murni	4.879.451.993.000	4.737.968.482.632	141.483.510.368	97,10
2 PNB	197.762.600.000	187.677.018.893	10.085.581.107	94,90
3 BLU	1.042.355.958.000	967.170.462.990	75.185.495.010	92,79
4 Hibah Langsung DN	981.700.000	981.700.000	-	100,00
5 Hibah Langsung LN	3.127.441.000	-	3.127.441.000	0,00
<u>Jumlah</u>	6.123.679.692.000	5.893.797.664.515	229.882.027.485	96,25

3.7. CASCADING ISS-IKP-IKK Transformasi SDM Kesehatan

3.7.1. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan

Impact/Outcame (SS dan ISS)	Outcame (IKP)	Output (IKK)	Target Capaian								PJ Es 2
			2022			2023		2024			
			Juni (B06)	Des (B12)	Capaian	Juni (B06)	Des (B12)	Juni (B06)	Des(B12)		
12 Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM yang berkualitas Persentase Faskes dengan SDM sesuai standar	3) Persentase puskesmas dengan dokter	4) Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	50	100	96%	50	100	50	100	Dit Penday agunaa n Nakes	
		5) Persentase puskesmas sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	20	40	34%	20	50	20	60	Dit Penday agunaa n Nakes	
	6) Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	a) Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	40	60	56%	40	80	40	90	Dit Penday agunaa n Nakes	
		b) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan yang berkualitas		100	100%		100		100	Dit Penday agunaa n Nakes	

Impact/Outcame (SS dan ISS)	Outcame (IKP)	Output (IKK)	Target Capaian								PJ Es 2
			2022			2023		2024			
			Jun (B06)	Des (B12)	Capaian	Jun (B06)	Des (B12)	Jun (B06)	Des (B12)		
	7) Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	a) Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	50	100	100%	50	100	50	100	Dit Pendayagunaan Nakes	
		b) Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan	200	500	500	200	600	200	700		
	8) Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	a) Jumlah calon dokter di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan		500	512	500	800	800	900		
		b) Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter		50	70.89%		80		100		

		c) Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	814	1314	1314	500	1500	1000	1500	Dit Penyed iaan Nakes
		d) Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan		1400	1569	1209	1760	808	1660	
		e) Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM Kesehatan		70	70.82%		80		90	
		f) Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	20	100	100%	20	100	20	100	
		g) Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di puskesmas		40	40.31%		45		50	
13. Meningkatnya kompetensi, dan	1) Jumlah SDM yang ditingkatkan	a) Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya	9000	20000	44.391	1100 0	2500 0	1400 0	3000 0	Dit Pening

sistem pendidikan Pelatihan SDM a. Persentase faskes dengan SDM yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	kompetensi ya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	sesuai dengan 9 penyakit prioritas								katan Mutu
		b) Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	30	35	48	40	50	60	90	Dit Peningkatan Mutu
		c) Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	40	98	100%	40	98	40	98	Dit Pendayagunaan Nakes
	2) Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	a) Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	95	95	55.68%	95	100	95	100	Set KKI
		b) Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	95	95	100%	95	100	95	100	Set KTKI
14. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM a) Persentase faskes dengan SDM tersertifikasi	1) Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan yang terakreditasi	a) Persentase penyelenggaraan uji kompetensi JF Kesehatan sesuai standar	-	25	27.20%	45	60	80	100	Dit Binwas Nake

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUNAN

4.1. Pokok- Pokok Kebijakan Rencana Kerja Tahunan 2024

Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan program dan kegiatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN dan anggaran fungsi pendidikan.

Peningkatan pendanaan kesehatan dapat melalui dukungan dana dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan pada program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung dan menggerakkan upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, Balita, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit serta penyehatan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk mendukung upaya program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui Dekonsentrasi dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

Sedangkan upaya peningkatan efektifitas pembiayaan fungsi pendidikan pada program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pendanaan fungsi pendidikan diutamakan untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) melalui : peningkatan kualitas lulusan/kompetensi tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan, penelitian bagi dosen Poltekkes termasuk publikasi baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, pengabdian kepada masyarakat.

Fungsi Pendidikan juga dipergunakan untuk pelaksanaan internship bagi tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020 — 2024 yang terbagi dalam 7 kegiatan mencapai RP. 27.99 T. Sedangkan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. **5.341.289.005 (Lima Triliyun Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Rupiah),-**

Berdasarkan Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja

Matriks Rencana Kerja Tahunan mengacu kepada Permenpan nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kesehatan/ Ditjen Nakes

Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	100 %
Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	60 %
Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	100 %

4.2. Alokasi Anggaran berdasarkan Kewenangan dan distribusi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024

ALOKASI ANGGARAN DITJEN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2024

**ALOKASI ANGGARAN DITJEN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024
BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN**

NO	SUMBER	TAHUN	
		2023	2024
1	RUPIAH MURNI	4.879.451.993	4.127.326.263
2	PNBP/BLU	1.239.930.293	1.213.962.742
3	PINJAMAN (HDN)	981.700	-
4	PINJAMAN (HLN)	3.127.441	-
JUMLAH		6.123.491.427	5.341.289.005

Catatan: dalam (Rp.000)
(2023 Pagu Alokasi 5,8 T bertambah 306 M)

**ALOKASI ANGGARAN DITJEN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024
BERDASARKAN JENIS BELANJA**

NO	JENIS BELANJA	TAHUN	
		2023	2024
1	Belanja Pegawai	1.019.772.453	1.090.286.632
2	Belanja Barang	3.744.293.335	3.717.874.318
3	Belanja Modal	1.359.425.639	533.128.055
JUMLAH		6.123.491.427	5.341.289.005

3



4.3 Distribusi Pagu Anggaran pada tahun 2024 per sumber dana

SATKER	PAGU TA 2024			
	Rupiah Murni	PNBP	BLU	Jumlah
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	4.127.326.263	227.320.145	986.642.597	5.341.289.005
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	42.890.841	1.383.495	-	44.274.336
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	37.372.586	374.819	-	37.747.405
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	49.455.071	-	65.500.000	114.955.071
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	39.685.353	-	32.200.000	71.885.353
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	58.544.616	2.115.862	-	60.660.478
POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	66.749.148	8.234.572	-	74.983.720
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	97.594.698	-	111.000.000	208.594.698
POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	77.492.035	-	56.826.260	134.318.295
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	76.170.850	-	57.000.000	133.170.850
POLITEKNIK KESEHATAN PALU	45.602.524	14.125.205	-	59.727.729
POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	61.878.567	-	47.301.600	109.180.167
POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	40.089.598	7.124.110	-	47.213.708
POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	22.561.941	6.171.550	-	28.733.491
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	38.572.300	-	30.628.040	69.200.340

POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	50.749.958	-	37.010.971	87.760.929
POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	43.045.038	-	30.697.800	73.742.838
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	50.701.914	-	32.893.800	83.595.714
POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	65.680.107	-	33.767.200	99.447.307
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	99.724.110	2.878.006	-	102.602.116
POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	86.042.866	-	31.675.272	117.718.138
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG	37.144.681	887.246	-	38.031.927
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	43.995.953	11.065.180	-	55.061.133
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	78.890.791	12.358.902	-	91.249.693
POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	35.243.201	-	30.014.643	65.257.844
POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	33.892.355	-	24.367.200	58.259.555
POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	66.972.479	-	18.440.542	85.413.021
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	39.062.323	902.310	-	39.964.633
POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	26.767.709	3.008.551	-	29.776.260
POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	33.903.710	8.722.122	-	42.625.832
BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM	31.210.182	210.319	-	31.420.501
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	38.304.518	16.566.361	-	54.870.879
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	82.794.646	-	56.000.000	138.794.646
POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	64.367.073	-	65.000.000	129.367.073

POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	56.006.796	16.659.117	-	72.665.913
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.646.786.023	39.146.796	-	1.685.932.819
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	22.057.446	7.105.539	-	29.162.985
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	58.110.511	-	44.622.940	102.733.451
POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	78.897.958	-	42.234.384	121.132.342
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	42.800.538	-	36.973.510	79.774.048
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	54.894.107	-	15.230.665	70.124.772
POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	38.436.863	11.262.650	-	49.699.513
POLTEKES KEMENKES ACEH	75.011.844	23.664.501	-	98.676.345
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	78.280.442	-	54.000.000	132.280.442
POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	108.837.629	22.406.720	-	131.244.349
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	69.408.695	-	33.257.770	102.666.465
POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	34.643.669	10.946.212	-	45.589.881

**ALOKASI ANGGARAN MENURUT KEGIATAN
BERDASARKAN KEWENANGAN TAHUN 2024**

(Rp.000)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KANTOR PUSAT	KANTOR DAERAH	BLOKIR	TOTAL
A	PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN	252.225.756	-	57.208.277	252.225.756
6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	24.241.808		1.751.262	24.241.808
6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	110.627.816		19.246.220	110.627.816
6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	53.624.775		22.995.324	53.624.775
6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	23.256.924		6.519.187	23.256.924
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	40.474.433		6.696.284	40.474.433
B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	1.177.065.667	1.983.219.602	159.222.847	3.160.285.269
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	45.410.710	191.090.220	6.133.890	236.500.930
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	446.919.799	174.125.184	13.806.070	621.044.983
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		1.618.004.198	136.604.037	1.618.004.198
5234	Pelaksanaan Intemship Tenaga Kesehatan	684.735.158		2.678.850	684.735.158
C	DUKUNGAN MANAJEMEN	256.641.396	1.672.136.584	29.831.959	1.928.777.980
4399	Tata Kelola SDM	71.157.948	7.791.680	94.500	78.949.628
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	185.483.448	1.664.344.904	29.737.459	1.849.828.352
JUMLAH		1.685.932.819	3.655.356.186	246.263.083	5.341.289.005

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 nomor SP-DIPA-024.12-0/2024 tanggal 24 November 2023, Rencana Penarikan dana dan Perkiraan Penerimaan ribu

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	252.225.756	11.072.782	12.234.882	18.689.928	14.577.326	17.676.125	16.590.623	23.259.773	24.463.056	23.158.507	26.904.095	31.083.147	32.515.510
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	74.335.650	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.637	6.194.643
2	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.160.285.269	153.367.956	177.313.995	250.493.410	230.134.450	252.507.431	254.764.953	285.235.449	287.891.638	296.030.540	302.762.304	364.193.624	305.589.521
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	1.156.635.613	162.894.545	127.131.091	62.958.413	64.609.413	65.693.350	112.085.265	168.802.303	101.667.762	72.245.060	57.235.278	57.204.843	104.108.290
3	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.928.777.980	106.504.764	137.844.657	150.709.506	175.641.879	153.704.491	165.274.411	153.735.227	159.652.534	156.979.013	167.367.103	177.584.286	223.780.107
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	5.341.289.005	270.945.503	327.393.534	419.892.844	420.353.655	423.888.047	436.629.986	462.230.449	472.007.228	476.168.060	497.033.502	572.861.058	561.885.138
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	1.230.971.263	169.089.182	133.325.728	69.153.050	70.804.050	71.887.987	118.279.902	174.996.940	107.862.399	78.439.697	63.429.915	63.399.480	110.302.933

4.4. Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

4.4.1. Pagu Indikatif

Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Rancangan ketetapan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran dengan nomor PR.01.05/A/21152/2024 tanggal 20 April 2023 hal Rancangan Ketetapan Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dan menindaklanjuti surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan B-292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023,

Pagu Indikatif Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 per Unit Utama Per Program

KODE	UNIT UTAMA/PROGRAM	RUPIAH MURNI				NON RUPIAH MURNI			TOTAL PAGU
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG OPERASIONAL	BELANJA NON OPERASIONAL	TOTAL RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024.12	DITJEN TENAGA KESEHATAN	1,090,286,632	644,035,177	2,393,004,454	4,127,326,263	321,470,446	843,202,055	-	5,291,998,764
DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			273,161,528	273,161,528	38,444,796			311,606,324
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			2,026,924,324	2,026,924,324	283,025,650	843,202,055		3,153,152,029
WA	Program Dukungan Manajemen	1,090,286,632	644,035,177	92,918,602	1,827,240,411				1,827,240,411

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

4.4.2. Pagu Anggaran

Pagu Anggaran yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Ketetapan pagu anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dengan nomor PR.04.01/F/1784/2023 tanggal 11 Agustus 2023 hal Ketetapan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan dengan nomor PR.04.01/A/35881/2023 tanggal 7 Agustus 2023 hal Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan ketetapan pagu Anggaran Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Lampiran 1
Nomor : PR.04.01/F/1784/2023
Tanggal : 11 Agustus 2023

KETETAPAN PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA 2024 PER PROGRAM PER KEGIATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	UNIT UTAMA/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN (TUPOKSI)				TOTAL	KOMPOSISI ANGGARAN PER FUNGSI	
				PNBP	BLU	PLN	RM		FUNGSI KESEHATAN	FUNGSI PENDIDIKAN
024.12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.090.286.632	644.035.177	254.344.640	959.618.102	-	2.393.004.454	5.341.289.005	3.038.549.649	2.302.739.356
024.DG	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN	-	-	38.444.796	-	-	213.780.960	252.225.756	252.225.756	-
6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	24.241.808	24.241.808	24.241.808	-
6812	Pendidagniaan Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	110.627.616	110.627.616	-	-
6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprrofesian Tenaga Kesehatan	-	-	24.570.000	-	-	29.054.775	53.624.775	53.624.775	-
6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	-	-	13.874.796	-	-	9.382.128	23.256.924	23.256.924	-
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	40.474.433	40.474.433	-	-
024.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	-	-	215.899.844	959.618.102	-	1.964.767.323	3.160.285.269	857.545.913	2.302.739.356
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	-	-	9.454.056	-	-	211.616.074	221.070.130	221.070.130	-
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	636.475.783	636.475.783	636.475.783	-
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	-	-	206.445.788	959.618.102	-	451.940.308	1.618.004.198	-	1.618.004.198
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	684.735.158	684.735.158	-	-
024.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.090.286.632	644.035.177	-	-	-	194.456.171	1.928.777.980	1.928.777.980	-
4399	Tata Kelola SDM	-	-	-	-	-	78.949.628	78.949.628	-	-
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Dijen Tenaga Kesehatan	1.090.286.632	644.035.177	-	-	-	115.506.543	1.849.828.352	1.849.828.352	-



drg. Arianti Anaya, MKM

4.4.3. Pagu Alokasi

Pagu Alokasi yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Ketetapan pagu alokasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dengan nomor PR.04.01/F/2400/2023 tanggal 6 Oktober 2023 hal Ketetapan Pagu Alokasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan dengan nomor PR.04.01/A/45571/2023 tanggal 29 September 2023 hal Pagu Alokasi Kementerian Kesehatan dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan ketetapan pagu Anggaran Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Lampiran 1
 Nomor : PR.04.01/F/2400/2023
 Tanggal : 6 Oktober 2023

KETETAPAN PAGU ALOKASI DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA 2024
 PER PROGRAM PER KEGIATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	UNIT UTAMA/PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN (TUPOKSI)				TOTAL	KOMPOSISI ANGGARAN PER FUNGSI	
				PNSP	BLU	PLN	RM		FUNGSI KESEHATAN	FUNGSI PENDIDIKAN
024.12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.690.286.632	644.035.177	245.765.887	968.202.055	-	2.393.004.454	5.341.289.605	3.035.549.649	2.302.739.356
024.DG	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN JKN	-	-	38.444.796	-	-	213.749.960	252.226.756	252.226.756	-
6811	Pencapaian Tenaga Kesehatan						24.241.809	24.241.809	24.241.809	
6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan						110.627.816	110.627.816	110.627.816	
6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan			24.579.000			29.094.775	53.624.775	53.624.775	
6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi			13.874.796			9.382.128	23.256.924	23.256.924	
6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan						40.474.433	40.474.433	40.474.433	
024.DL	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	-	-	287.315.891	968.202.055	-	1.884.767.323	3.160.285.269	857.545.913	2.302.739.356
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			9.454.057			227.048.873	236.500.930	236.500.930	
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan						621.044.983	621.044.983	621.044.983	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			197.861.834	968.202.055		451.940.309	1.618.004.198		1.618.004.198
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan						684.735.158	684.735.158		684.735.158
024.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.090.286.632	644.035.177	-	-	-	194.456.171	1.928.777.980	1.928.777.980	-
4399	Tata Kelola SDM						78.949.628	78.949.628		
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	1.090.286.632	644.035.177				115.506.543	1.849.828.352	1.849.828.352	



drg. Arianti Anaya, MKM

BAB V

PENUTUP

5.1. Penutup

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih teratur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024. Perencanaan program disusun secara bottom up dari masing masing program dan kegiatan berdasarkan arah perkembangan organisasi. Alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA-024.12-0/2024**



DS:0685-7267-1377-0604

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA | : | 024 KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. UNIT ORGANISASI | : | 024.12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN |
| 3. PAGU | : | Rp.5.341.289.005.000 |
- (LIMA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
5. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



ISA RACHMATARWATA
NIP.196612301991021001

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-024.12-0/2024



DS.0585-7287-1377-0004

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 1 dari 7

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	024	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. UNIT ORGANISASI	:	12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
3. PAGU	:	Rp.5.341.289.005.000	

(LIMA TRILIUN TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	252.225.756
	:	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.160.285.269
	:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.928.777.980
2. SASARAN STRATEGIS K/L	:	01	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan Pendekatan Keluarga	
	:	02	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan yankes primer	
	:	03	Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	
	:	04	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	
	:	05	Menguatnya Tata Kelola Manajemen dan Pelayanan Spesialistik	
	:	06	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan	



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA-024.12-0/2024

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM



Halaman : 2 dari 7

	unggulan dan pengembangan layanan lain
: 07	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri
: 08	Menguatnya surveilans yang adekuat
: 09	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
: 10	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
: 11	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)
: 12	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
: 13	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
: 14	Meningkatnya sistem pembinaan



DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA-024.12-0/2024



050585729713770804

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman : 3 dari 7

		Jabatan fungsional dan karier SOM kesehatan	
	: 15	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	
	: 16	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	
	: 17	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	
3. FUNGSI	: 07	KESEHATAN	3.038.549.649
SUB FUNGSI	: 0790	KESEHATAN LAINNYA	3.038.549.649
FUNGSI	: 10	PENDIDIKAN	2.302.739.356
SUB FUNGSI	: 1006	PENDIDIKAN TINGGI	2.302.739.356
4. PRIORITAS NASIONAL	: 03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	621.945.362
NON PRIORITAS NASIONAL	:		4.719.343.643